



PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA)

Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

A hotel tax revenue is a high potential income for Yogyakarta as a tourism city. However, this contribution to revenue tends to fluctuate. This study aims to determine the influence of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy rates in Yogyakarta from 2001 to 2011 for hotel tax revenue.

The analytical method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Descriptive analysis explains the description of the data that comprises the study of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy rates in Yogyakarta from 2001 to 2011. While the multiple linear regression analysis is used to prove the hypothesis of the influence of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy rates for hotel tax revenue.

The results showed a positive influence of tourists numbers and hotel occupancy rates for Yogyakarta hotel tax revenue. This means that the higher of the number of tourists and hotel occupancy rates, relate to the higher income of the tax revenue in Yogyakarta. The findings of the study also generate that amount of hotel is not give a positive influence on the hotel tax revenue in Yogyakarta. This means that the number of hotels will not affect the tax revenue in Yogyakarta.

Keywords: *Hotel Tax Revenues, The Number Of Tourists, The Number Of Hotels, The Occupancy Rate Of Hotels*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 provinsi dan 530 kota/kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk pemeratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatian, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah

¹ Penulis penanggung jawab

otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Penerapan desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Semakin tinggi peranan PAD merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (penerimaan bangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMN).

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang antara lain berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak propinsi dan Pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Jenis-jenis pajak propinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Walaupun demikian, daerah propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Pajak hotel bagi daerah mempunyai potensi yang tinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan mampu mendukung segala aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Mengingat Kota Yogyakarta termasuk kota pariwisata yang selalu ramai dikunjungi turis dari dalam maupun luar kota.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Faktor-faktor yang di duga mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel adalah Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel.

Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Wisatawan > 0 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Jumlah Hotel > 0 : Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Dewasa ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja.

Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011) menemukan bahwa bahwa variabel jumlah hunian kamar mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Jumlah Hotel > 0 : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penerimaan pajak hotel dijadikan sebagai variabel dependen. Untuk mempermudah pemahaman, variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Hotel yang disimbolkan dengan Y. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. Data penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan hitung rupiah.

Selain itu penelitian ini melibatkan empat variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011. Data jumlah kunjungan wisatawan diukur dalam satuan orang.
2. Jumlah hotel adalah banyaknya penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Data Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan unit.
3. Tingkat hunian hotel adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati di Kota Yogyakarta yang terjual atau terhuni. Data Jumlah Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan hari.

Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif menjelaskan gambaran data-data penelitian yang terdiri dari jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak Hotel di Kota Yogyakarta dari tahun 2001 – 2011. Sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Yogyakarta (dalam satuan orang). Data perkembangan jumlah wisatawan di kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2001-2011 dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

Tahun	Perkembangan Jumlah Wisatawan (%)
2001	
2002	-27.7%
2003	8.8%
2004	31.3%
2005	-11.1%
2006	-55.3%
2007	76.3%
2008	39.1%
2009	15.7%
2010	21.3%
2011	8.5%
Rata-rata	10.7%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013

Jumlah kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta rata-rata sebesar 1.696.544 orang per tahun, dengan rata-rata perkembangan jumlah wisatawan sebesar 10,7%. Artinya dalam setiap

tahunnya, jumlah wisawatan baik domestik maupun manca negara yang datang ke Yogyakarta mengalami pertumbuhan sebesar 10,7%.

Tingkat perkembangan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai -55,3%, dengan jumlah wisatawan tahun 2005 sebesar 1.600.000 orang menurun tahun 2006 menjadi 715.210 orang atau menurun sebesar 55,3%. Hal ini disebabkan karena peristiwa gempa bumi yang melanda wilayah Yogyakarta, sehingga mengakibatkan kegiatan wisata di Yogyakarta terganggu. Namun demikian satu tahun paska gempa bumi yaitu tahun 2007 jumlah wisawatan ini mengalami peningkatan kembali dengan perkembangan tertinggi yaitu mencapai 76,3%.

Peningkatan jumlah wisatawan ini tidak terlepas dari keberhasilan strategi promosi (pemasaran) yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Yogyakarta. Kesuksesan promosi tersebut merupakan kesuksesan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Yogyakarta dalam mengomunikasikan berbagai daya tarik objek wisata kepada wisatawan dengan berbagai strategi pemasaran. Peran strategis pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan arus kunjungan wisata dapat dilakukan melalui strategi kebijakan pengembangan destinasi wisata (mencakup daya tarik, prasarana dan fasilitas), industri pendukung, serta promosi kegiatan wisata. Perkembangan wisatawan terutama domestik juga sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Kunjungan akan meningkat tajam pada saat musim liburan sekolah, libur panjang akhir pekan, libur hari raya keagamaan maupun akhir tahun. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi institusi yang terkait dalam menyusun dan menentukan kalender kegiatan wisata di DIY.

2 Perkembangan Jumlah Hotel

Data jumlah hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2011 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Data perkembangan jumlah hotel di kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2001-2011, dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

Tahun	Perkembangan (%)
2001	
2002	13.3%
2003	21.6%
2004	32.8%
2005	-6.1%
2006	4.0%
2007	0.6%
2008	-0.3%
2009	8.0%
2010	8.0%
2011	0.8%
Rata-rata Pertumbuhan	8.3%

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Pertumbuhan Jumlah hotel di kota Yogyakarta dari tahun 2001 – 2011 rata-rata sebesar 8,3% per tahun. Artinya dalam setiap tahunnya, jumlah hotel yang ada di Yogyakarta mengalami pertumbuhan 8,3% per tahun.

Tingkat perkembangan hotel terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu mencapai -6,1%, dengan jumlah hotel tahun 2004 sebesar 344 unit menurun tahun 2005 menjadi 323 unit atau menurun sebesar 6,1%. Sedangkan perkembangan jumlah hotel tertinggi adalah sebesar 32,8% yaitu tahun 2004.

Pertumbuhan jumlah hotel yang lambat di kota Yogyakarta dikarenakan antara tahun 2001 hingga 2011 sektor hotel di Kota Yogyakarta sedang berusaha untuk keluar dari keterpurukan setelah terjadinya bencana alam yang merusak objek wisata serta infrastruktur hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang lambat pada jumlah hotel disebabkan karena jumlah hotel di Kota Yogyakarta harus menata ulang seluruh kegiatan dan

infrastruktur hotel setelah adanya bencana gempa bumi dan meletusnya gunung merapi pada tahun 2006 dan tahun 2010.

3. Perkembangan Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian kamar hotel dalam penelitian ini diukur dengan rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Yogyakarta dalam satuan hari. Hasil analisis perkembangan tingkat hunian di kota Yogyakarta dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

Tahun	Perkembangan (%)
2001	
2002	-0.9%
2003	0.3%
2004	5.9%
2005	20.1%
2006	-5.1%
2007	-1.5%
2008	18.9%
2009	0.8%
2010	2.5%
2011	3.2%
Rata-rata	4.4%

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Tingkat hunian hotel di kota Yogyakarta dari tahun 2001 – 2011 rata-rata sebesar 2,08 hari. Artinya wisatawan yang datang di Yogyakarta rata-rata menginap 2 hari. Sedangkan rata-rata perkembangan tingkat hunian adalah positif yaitu sebesar 4,4%. Artinya dalam setiap tahunnya, wisatawan mengalami peningkatan tingkat hunian di Yogyakarta dengan pertumbuhan sebesar 4,4% per tahun.

Namun demikian jika dilihat dari perkembangan tingkat hunian yang ada menunjukkan data yang berfluktuatif. Perkembangan jumlah hunian kamar di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 pertumbuhan jumlah hunian kamar sebesar -5,1%, hal ini terjadi karena bencana alam gempa bumi dan bencana merapi. Kemudian tahun 2008 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 18,9%. Salah satu penyebab terjadinya fluktuatif pertumbuhan jumlah hunian kamar karena kurangnya kerjasama antara kegiatan pemerintah pengusaha hotel dalam mempromosikan daerah Yogyakarta, terutama untuk menggali potensi pariwisata yang ada.

4. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel (dalam satuan rupiah).

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa yang selanjutnya disebut pajak daerah (pajak hotel,dll), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, mendefinisikan Pajak Hotel sebagai berikut : “bahwa pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Yogyakarta tahun 2001-2011, dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Perkembangan (%)
2001	12,245,242,445.00	
2002	16,041,968,352.00	31.0%
2003	11,859,150,595.00	-26.1%
2004	14,408,220,726.00	21.5%
2005	17,994,725,877.00	24.9%
2006	14,575,296,725.00	-19.0%
2007	20,529,610,846.00	40.9%
2008	26,544,641,894.00	29.3%
2009	30,788,901,395.00	16.0%
2010	32,515,281,932.00	5.6%
2011	37,861,435,936.00	16.4%
Rata-rata	21,396,770,611.18	14.1%

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Penerimaan pajak hotel di kota Yogyakarta dari tahun 2001 – 2011 rata-rata adalah sebesar Rp.21.396.770.611,18. Artinya besarnya penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak Hotel dalam satu tahun adalah sebesar Rp.21.396.770.611,18. Sedangkan pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup tinggi yaitu 14,1% per tahun.

Pertumbuhan pajak hotel ini disebabkan karena era baru pemerintahan daerah Tahun 2001 dengan diberlakukan otonomi daerah membawa implikasi positif bagi perekonomian nasional, termasuk juga di kota Yogyakarta. Desentralisasi fiskal membawa angin segar bagi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat pada Tabel 4, penerimaan pajak Hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setelah berjalannya pelaksanaan otonomi daerah Tahun 2001, terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel berlanjut hingga Tahun 2011, seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, menjelaskan tentang program dan kegiatan lintas SKPD salah satunya adalah kegiatan optimalisasi pajak hotel dan pajak restoran, sehingga perolehan dari pajak tersebut mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.37.861.435.936.

5. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi.

6. Deteksi Normalitas Data

Deteksi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data-data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai sig (p-value) > 0,05 menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Deteksi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Parameter	Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000014
	Std. Deviation	2.49762180E9
Most Extreme Differences	Absolute	.160
	Positive	.160
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.531
Asymp. Sig. (2-tailed)		.940

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2013

Hasil Deteksi Normalitas menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,940 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini telah berdistribusi normal.

7. Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batasan dari *Tolerance Value* adalah 0.1. jika nilai *Tolerance Value* melebihi 0.1 maka terjadi gejala Multikolinieritas. Batasan dari nilai VIF adalah 10, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10 berarti Multikolinieritasnya tinggi. Sebaliknya apabila nilai VIF dibawah 10 diasumsikan tidak terjadi Multikolinieritas (Imam Ghozali, 2009).

Tabel 6
Deteksi Multikolinieritas

Model Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah Wisatawan	.583	1.715
Jumlah Hotel	.304	3.289
Tingkat Hunian	.234	4.270

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 6 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas, yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi berganda.

8. Deteksi Autokorelasi

Untuk menganalisis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson Test dengan nilai Durbin Watson Tabel. Batasan ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut (Algifari, 1997)

Tabel 7
Teori Pengukuran Autokorelasi

Dw	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokorelasi
1,10 sampai dengan 1,54	Tanpa kesimpulan
1,55 sampai dengan 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,47 sampai dengan 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Sumber : Algifari,1997

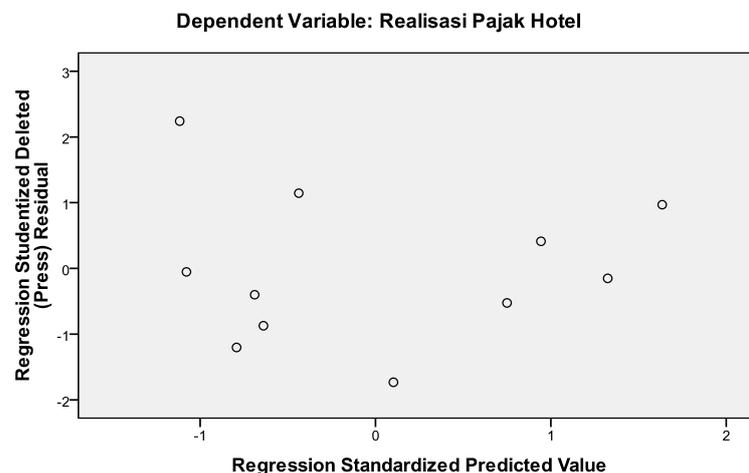
Pendeteksian ini dilakukan untuk mencari ada atau tidaknya autokorelasi dengan melakukan uji Durbin Watson (DW), dan diperoleh hasil DW_{hitung} sebesar 2,164. Berdasarkan Tabel 4.8 DW_{hitung} terletak diantara 1,55 sampai dengan 2,46. Dengan demikian DW jatuh pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model.

9. Deteksi Heteroskedastisitas

Pendeteksian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dan variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *disturbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi.

Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah model *chart* (diagram pencar) dengan dasar pemikiran sebagai berikut (Imam Ghozali, 2005): Hasil Deteksi Heteroskedastisitas tersebut dapat di tampilkan pada gambar berikut:

Gambar 1
Deteksi Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Dari Gambar 1 dapat diketahui plot residual tersebar diatas dan di bawah titik 0, atau tidak membentuk pola U maupun pola U terbalik, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

10. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hasil

pengujian terhadap model regresi berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Regresi Linier Berganda
Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Tingkat Hunian
terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta

Variabel Independen	Koef. Regresi	Beta	T	sig-2 tailed	Sig-1 tailed
(Constant)	-28,355,118,372.557		-4.622	0.002	0.001
Jumlah Wisatawan	5.162,832	0.318	2.332	0.052	0.026
Jumlah Hotel	-5,212,455.380	-0.039	-0.209	0.841	0.420
Tingkat Hunian	20,494,486,105.675	0.758	3.519	0.010	0.005
Adjusted R2	0.891				
F hitung	28.357				
Sig. F	0.000				
N	11				

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Dari Tabel 8 dapat dinyatakan formula persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_n = -28.355.118.372,557 + 5.162,832X_1 - 5.212.455,380 X_2 + 20.494.486.105,675X_3$$

Koefisien regresi jumlah wisatawan sebesar 5.162,832 berarti bahwa ada hubungan positif jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Setiap peningkatan jumlah wisatawan sebesar 1 orang maka dapat diestimasikan penerimaan pajak hotel akan meningkat sebesar 5.162,832 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan. Artinya semakin meningkat jumlah wisatawan maka penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta akan semakin meningkat (didapatkan dari perhitungan melalui program SPSS).

Koefisien regresi jumlah hotel sebesar -5.212.455,380 berarti bahwa ada hubungan negatif jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta, tetapi secara statistik tidak signifikan.

Koefisien regresi tingkat hunian hotel sebesar 20.494.486.105,675 berarti bahwa ada hubungan positif tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Setiap peningkatan tingkat hunian sebanyak 1 hari akan meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 20.494.486.105,675 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Artinya semakin tinggi tingkat hunian hotel maka penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta semakin meningkat (didapatkan dari perhitungan melalui program SPSS).

11. Deteksi F

Deteksi statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dari uji ANOVA atau F test dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 28,357 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penerimaan pajak Hotel atau dapat dikatakan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian secara serentak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Hotel di Kota Yogyakarta periode 2001-2011.

12. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan berapa persen penerimaan pajak hotel Dapat dijelaskan oleh jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel. Dari Tabel 4.8 di atas dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,891, yang berarti 89,1% variasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas

yang terdiri dari jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel. Sedangkan sisanya 10,9% variasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

13. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diketahui nilai t hitung masing-masing variabel dan probabilitas (sig-t). Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka secara parsial variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

a. Pengaruh Jumlah wisatawan (X_1) terhadap Penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta

Pada variabel jumlah wisatawan diperoleh t hitung sebesar 2,332 dengan sig (1 tailed) sebesar $0,026 < 0,05$ sehingga **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Artinya jumlah wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Artinya semakin besar jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta maka jumlah penerimaan pajak hotelnya juga akan semakin besar. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan “Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel”

b. Pengaruh Jumlah hotel (X_2) terhadap Penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta

Pada variabel jumlah hotel diperoleh t hitung sebesar -0,039 dengan probabilitas sebesar $0,420 > 0,05$ sehingga **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Artinya jumlah hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Artinya banyak sedikitnya jumlah hotel di Kota Yogyakarta tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini sekaligus menolak hipotesis kedua yang menyatakan “Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel” Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total penerimaan / pendapatan hotel.

c. Pengaruh Tingkat hunian hotel (X_3) terhadap Penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta

Pada variabel tingkat hunian hotel diperoleh t hitung sebesar 3,519 dengan probabilitas (sig 1 tailed) sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Artinya tingkat hunian hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Dengan demikian semakin besar tingkat hunian hotel maka semakin besar pula penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini mampu membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan “Tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel”

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian dengan regresi berganda menemukan bahwa besarnya pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta adalah 89,1% dan sisanya 10,9% variasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menemukan bahwa jumlah wisatawan, dan tingkat hunian yang terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta, Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Alam Pradito Widiatmoko (2009), yang menemukan bahwa jumlah wisatawan, PDRB, tingkat hunian dan fasilitas penunjang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian juga mendukung penelitian Muqaddas, Saleh dan Madris (2011) yang menemukan jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar secara simultan mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan pajak perhotelan.

1. Pengaruh Jumlah wisatawan terhadap Penerimaan pajak hotel

Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Winarti Agustiningtyas (2003) yang menemukan bahwa jumlah wisatawan memberikan pengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak.

Sebagai salah satu kota yang memprioritaskan sektor pariwisatanya, kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan yang datang berkunjung memiliki tujuan berbeda, sebagian ada yang hendak berrekreasi, sebagian ada pula yang datang ke kota Yogyakarta untuk berbisnis. Para wisatawan diasumsikan berkunjung dan menginap di hotel yang ada di kota Yogyakarta. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengenakan pajak atas layanan yang dilakukan oleh hotel. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta.

2. Pengaruh Jumlah hotel terhadap Penerimaan pajak hotel

Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak didukung. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Satria Adi Nugraha (2012) yang menemukan jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Semarang.

Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak Hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total penerimaan / pendapatan Hotel. Sementara pendapatan hotel sangat ditentukan oleh jumlah tamu hotel, dan lama menginap. Semakin penuh jumlah pengunjung hotel dan semakin lama mereka menginap, maka pendapatan hotel akan semakin besar. Sementara jumlah hotel yang banyak jika tidak sesuai dengan jumlah wisatawan yang ada, maka pendapatan hotel juga tidak akan mengalami peningkatan, sehingga penerimaan pajakpun juga tidak akan mengalami peningkatan. Dalam faktanya jumlah hotel di Yogyakarta dalam kurun waktu 10 tahun terakhir relatif tetap. Jika ada kenaikan jumlahnya tidak terlalu signifikan. Dengan demikian jumlah hotel belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

3. Pengaruh Tingkat hunian hotel terhadap Penerimaan pajak hotel

Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini didukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Alam Pradita Widatmoko (2009); Muqaddas, Saleh dan Madris (2011) dan Tamam (2012) yang menemukan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun ini perkembangan perhotelan di kota Yogyakarta tumbuh pesat. Fungsi hotel tidak lagi hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja. Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar tersedia. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Perkembangan industri perhotelan seiring dengan menggeliatnya industri pariwisata, dapat memberikan keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Hotel, apabila semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

Terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel, semakin tinggi pula penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah hotel tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dengan menggunakan sumber data yang berbeda, yaitu instansi BPS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Sehingga dimungkinkan keakuratan data tersebut menjadi lemah yang menyebabkan jumlah hotel tidak terbukti signifikan.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya hendaknya disarankan agar melakukan penelitian dengan objek dan periode yang lebih panjang serta menggunakan satu sumber data sehingga diharapkan data lebih homogen (tidak bervariasi).

REFERENSI

- A. Azinar Muqaddas R., A. Karim Saleh dan Madris.2011. "Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan Di Kota Parepare."
- Alam Pradita Widiatmoko.2009. "Analisis Pajak Hotel dan Potensi Pengembangannya Studi Kasus Kabupaten Semarang." Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP IESP
- Algifari.1997. Analisis Regresi, Teori, Kasus, dan Solusi. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Arsyad, Lincoln. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Badan Pusat Statistik. Propinsi D.I Yogyakarta Dalam Angka berbagai edisi. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badru Tamam.2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 1997-2008." Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Syarif Hidayatullah
- Bambang, Juanda dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori & Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Betty Rahayu.2010. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul." Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP IESP
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.
- Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- Djajadiningrat. 2005. "Pajak Sebagai Suatu Kewajiban." Tjahjono dan Husein, h.2
- Ditjen Otda Depdagri. 2012. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdagri RI (www.ditjen-otda.depdagri.go.id)
- Ghozali,I.2009. *Ekonometrika Teori, konsep, dan aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hanggara. 2009. "Tingkat Hunian Hotel."
- Imanda Epata Ginting.2010. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Badung Periode 1996-2006." Skripsi, Surabaya: UNAIR
- Karyono. 1997."Jenis dan Karakteristik Wisatawan."
- Kesit Bambang Prakosa. 2003."Potensi dan Hambatan Pajak Hotel."



- Kuncoro.2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkusubroto,G. 1993,*h.181.Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Munawir, Slamet, dkk. 1990. *Perpajakan Untuk SLTA*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rudi. 2001."Industri Pariwisata."
- Satria Adi Nugraha.2012. "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Kota Semarang tahun 2001-2010." Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP IESP
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1994."Pajak adalah iuran Kepada Negara."
- Tarmoezi. 2000."Jenis Hotel, Jumlah Hotel, Tingkat Hunian Hotel."
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.edisi 2*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Veronika Winarti Agustiningtyas.2003. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah tahun 1998 - 2001." Tesis, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP MIESP
- Waluyo. 2008."Jenis Pajak."
- Wijaya, Tony. 2011. *Cara cepat menguasai SPSS 19 untuk olah & interpretasi*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

www.ditjen-otda.depdagri.go.id

<http://www.jogjakota.go.id>